

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1. Sejarah Perusahaan**

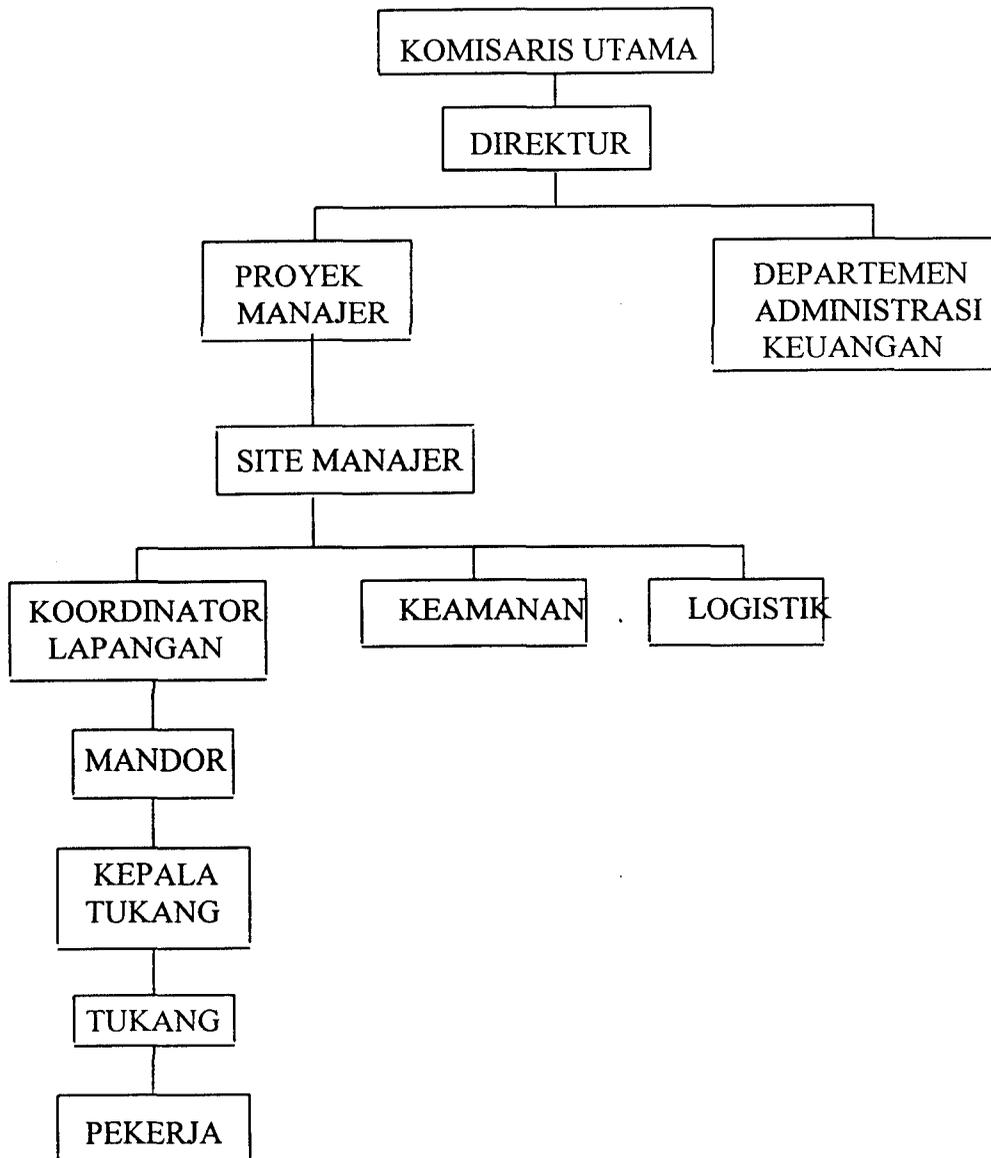
Perusahaan kontraktor ini merupakan suatu perusahaan yang berbentuk perseroan komanditer (**CV**) dan berbadan hukum berdasarkan **akte** notaris nomor 12 tanggal **5 Juni 1996** dan berkedudukan di Surabaya.

Menurut akte pendiriannya, perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha konstruksi, perdagangan umum, usaha pengangkutan dan usaha biro teknik umum sebagai perencana, pemborong dan pelaksana pekerjaan pembangunan bangunan-bangunan umum, termasuk pembangunan gedung-gedung, **jalan** raya, jembatan, perumahan dan irigasi serta juga melaksanakan pemasangan instalasi-instalasi teknik, termasuk instalasi listrik dan saluran air.

##### **4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan**

Perusahaan mempunyai dua struktur organisasi yaitu struktur organisasi perusahaan dan struktur organisasi proyek yang dibentuk pada saat perusahaan mengerjakan suatu proyek. Gambar struktur organisasi perusahaan dan gambar struktur organisasi proyek adalah sebagai berikut:

GAMBAR 1  
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN



Sumber: Data Perusahaan

### 4.1.3. Kegiatan Operasi Perusahaan

Perusahaan melaksanakan pekerjaan pembangunan suatu proyek yang dipercayakan oleh pihak pemberi kerja kepadanya. Selama ini proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan diperoleh dari pihak pemerintah dan swasta. Dalam melaksanakan pekerjaannya, semua kebutuhan bahan-bahan, perlengkapan dan lain-lain yang berhubungan dengan proyek akan dicukupi sendiri oleh perusahaan. Secara garis besar, urutan kegiatan yang dilaksanakan perusahaan sejak suatu pekerjaan diperoleh hingga diselesaikan dan diserahkan kepada pihak pemberi kerja adalah sebagai berikut:

1. Setelah pihak pemberi kerja mengumumkan pemenang pelelangan pekerjaan (proyek) tertentu, maka perusahaan akan memperoleh pelulusan pekerjaan dari pemberi kerja melalui surat, yang menyatakan bahwa perusahaan telah memenangkan tender.
2. Berdasarkan pelulusan pekerjaan, kemudian dibuatkan perjanjian antara pihak pemberi kerja dengan pihak perusahaan, yang dilampirkan pula anggaran biaya pelaksanaan proyek yang merupakan penawaran **dari** pihak perusahaan.
3. Dalam waktu kurang lebih satu minggu setelah dikeluarkan surat pelulusan pekerjaan perusahaan memperoleh surat perintah kerja (SPK) yang antara lain berisi: kapan suatu pekerjaan sudah dapat dimulai dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan serta sanksi keterlambatan dari proyek tersebut.
4. Setelah SPK diterima maka mulailah perusahaan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan gambar yang ada.
5. Setiap bulan perusahaan akan melaporkan prestasi pekerjaan yang telah

dicapai kepada Direksi Pengawas Lapangan yang ditunjuk oleh pihak pemberi kerja.

6. Setelah pekerjaan mencapai 100% maka dibuat berita acara penyerahan pekerjaan yang pertama.
7. Setelah selesai jangka waktu pemeliharaan yang biasanya 90 hari setelah penyerahan pertama, akan dibuatkan berita acara penyerahan pekerjaan yang kedua.
8. Setelah berita acara penyerahan pekerjaan yang kedua selesai dibuat dan telah disetujui maka selesailah tugas perusahaan dalam hal melaksanakan pekerjaan pemborongan proyek tersebut.

#### **4.1.4. Proses Pencatatan Data Akuntansi Perusahaan**

Untuk dapat menyediakan data keuangan dari suatu perusahaan, setiap transaksi perlu dicatat, digolong-golongkan, diringkas dan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Mulai dari kegiatan pencatatan sampai dengan penyajian disebut proses akuntansi. Perusahaan dalam mencatat data-data akuntansinya menganut sistem *cash basis*, di mana pendapatan dan biaya baru dicatat jika sudah diterima atau sudah dibayarkan.

Setiap transaksi keuangan perusahaan dicatat dalam buku-buku harian berdasarkan bukti-bukti transaksi yang ada, selain itu perusahaan juga menggunakan laporan administrasi proyek untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan *suatu* proyek tertentu yang sedang dikerjakan.

Buku harian yang dimiliki oleh perusahaan adalah:

1. Buku Harian Kas, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang kas. Penerimaan uang kas biasanya meliputi pengambilan uang tunai dari Bank, penerimaan uang tunai atas pelunasan piutang termyn dan penerimaan uang tunai lainnya. Sedangkan pengeluaran kas meliputi pengeluaran uang tunai untuk pembelian barang, pembayaran biaya gaji, pelunasan hutang, penyetoran untuk mengisi rekening Bank dan pengeluaran yang lainnya.
2. Buku Harian Bank, yaitu digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan **Bank**, seperti penerimaan-penerimaan yang berasal dari penyetoran uang tunai dari kas, penerimaan pembayaran tennyn serta penerimaan lainnya, dan pengeluaran-pengeluaran bank yang meliputi pembayaran hutang perusahaan, pengambilan uang tunai untuk mengisi kas, dan lain-lain.
3. Buku Pembelian, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian baik secara kredit maupun tunai, yang meliputi pembelian bahan-bahan material proyek, peralatan kantor dan sebagainya.
4. Buku Memorial, yaitu digunakan untuk mencatat peristiwa, kejadian serta transaksi yang tidak dicatat oleh ketiga buku harian tersebut di atas.
5. Laporan Administrasi Proyek, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan suatu proyek yang sedang dikerjakan, yang meliputi daftar harian bahan material yang digunakan, daftar biaya tenaga kerja langsung untuk proyek tersebut, daftar biaya operasi dan biaya provisi serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan proyek tersebut.

Proses pencatatan data akuntansi untuk suatu proyek dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi dari pembelian bahan-bahan dan mencatatnya dalam daftar harian bahan masuk dalam laporan administrasi proyek dan diringkas dalam daftar bulanan bahan dalam laporan yang sama. Demikian juga untuk biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja, biaya operasi dan biaya provisi yang berhubungan dengan proyek tersebut, dicatat dalam laporan administrasi proyek tersebut. Pada akhir masa pengerjaan proyek, bagian administrasi membuat laporan laba rugi proyek tersebut pada laporan administrasi proyek yang bersangkutan.

Pada setiap akhir periode disusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Penyusunan neraca dimaksudkan untuk mengetahui posisi aktiva, kewajiban serta modal pada suatu saat tertentu, sedangkan laporan laba rugi disusun untuk mengetahui besarnya laba yang telah dicapai perusahaan selama satu periode tertentu.

## **4.2. Deskripsi Hasil Penelitian**

### **4.2.1. Pencatatan PPN Sebagai Akibat Pembelian Bahan dan Penerimaan Termin-Termin pada Perusahaan**

Perusahaan kontraktor ini merupakan pengusaha kena pajak (PKP). Sebagai PKP, perusahaan mempunyai kewajiban perpajakan yang berkenaan dengan pembelian barang kena pajak dan penjualan/ penyerahan jasa kena pajak sehubungan dengan pekerjaannya sebagai *pemborong* bangunan yang dilakukannya, selain itu juga berkewajiban menghitung dan menyetorkan Pajak

Pertambahan Nilai-nya ke kas negara dari PPN atas penerimaan uang muka, penerimaan termin-termin dari proyek yang dikerjakan oleh perusahaan.

#### 1. PPN Keluaran

**Atas** penyerahan jasa pemborong bangunan (yang merupakan jasa kena pajak) kepada pemberi kerja, perusahaan mendapatkan penggantian sejumlah nilai kontrak yang telah disetujui, di mana di dalam nilai kontrak tersebut termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan nilai yang nantinya akan disetorkan ke kas negara berdasarkan jumlah pembayaran yang akan dilakukan oleh pemberi kerja kepada perusahaan sesuai dengan isi kontrak. Dalam hal ini, Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan PPN keluaran bagi perusahaan, yang harus dilaporkan pada setiap masa pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Atas transaksi tersebut pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Kas/ Bank	<b>xx</b>
Biaya pajak	<b>xx</b>
Pendapatan kontrak	<b>xx</b>

(jurnal untuk mencatat penerimaan **uang** muka atau penerimaan termyn)

#### 2. PPNMasukan

**Atas** pembelian bahan-bahan material yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan suatu proyek, baik untuk bahan yang merupakan barang kena pajak maupun yang bukan barang kena pajak, perusahaan akan dipotong pajak oleh pihak penjual atas barang kena pajak yang dibelinya. Pajak ini merupakan PPN Masukan bagi perusahaan yang nantinya dapat diperhitungkan dengan PPN Keluaran untuk mendapatkan jumlah PPN terutang. Selama ini perusahaan dalam

melakukan transaksi pembelian hanya menerima bukti transaksi berupa nota pembelian dan tidak menerima faktur pajak standar atas pembelian barang kena pajak, sedangkan harga yang dibayarkan oleh perusahaan sudah termasuk pajak atas barang tersebut (*including PPN*). Sehingga perusahaan kehilangan haknya untuk melakukan pengkreditan atas pajak masukan dari pembelian barang kena pajak tersebut. Pencatatan yang dilakukan atas transaksi pembelian adalah:

Pembelian	<b>xx</b>
Kas/ Bank	<b>xx</b>

(jurnal untuk mencatat transaksi pembelian barang)

Jadi, selama ini perusahaan melaporkan jumlah pajaknya yang terutang hanya dari jumlah PPN Keluaran yang telah dipungut oleh pemberi kerja atau yang disetor sendiri tanpa memasukkan unsur PPN Masukan dalam SPT Masa, atau dengan kata lain PPN Masukannya selalu nihil. Hal ini sebenarnya merugikan perusahaan karena perusahaan harus membayar pajak secara berganda, di mana hal ini tidak sesuai dengan keuntungan yang dimiliki oleh sistem PPN yang menghapuskan adanya pajak berganda dengan adanya mekanisme pengkreditan **pajak** masukan.

Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktek akuntansi Pajak pertambahan Nilai pada perusahaan atas suatu proyek konstruksi, berikut ini akan diuraikan dengan menggunakan contoh proyek pembangunan bengkel praktek (gudang untuk kerja). Informasi yang berhubungan dengan proyek tersebut adalah:

1. Proyek pembangunan bengkel praktek ini dikerjakan mulai tanggal 22 Juli

- 1999 sampai dengan akhir November 1999.
2. Total harga kontrak adalah Rp. 525.000.000 *including* PPN.
  3. Dengan syarat pembayaran termyn sebagai berikut:
    - a. Uang muka proyek sebesar 20% dari total harga kontrak atau sama dengan Rp. 105.000.000.
    - b. Termin pertama sebesar 15% dari total nilai kontrak yang kemudian dikurangi 15% dari uang muka yang telah diterima atau sama dengan Rp. 63.000.000 akan dibayarkan pada saat prestasi pekerjaan mencapai 20%.
    - c. Termin kedua sebesar 25% dari total nilai kontrak yang kemudian dikurangi 25% dari uang muka yang telah diterima atau sama dengan Rp. 105.000.000 akan dibayarkan pada saat prestasi pekerjaan mencapai 45%.
    - d. Termin ketiga sebesar 25% dari total nilai kontrak yang kemudian dikurangi 25% dari uang muka yang telah diterima atau sama dengan Rp. 105.000.000 akan dibayarkan pada saat prestasi pekerjaan mencapai **70%**.
    - e. Termin keempat sebesar **30%** dari total nilai kontrak yang kemudian dikurangi 30% dari uang muka yang telah diterima atau sama dengan Rp. 126.000.000 akan dibayarkan pada saat prestasi pekerjaan mencapai 100%.
    - f. Termin kelima sebesar 5% dari total nilai kontrak yang kemudian dikurangi 5% dari uang muka yang telah diterima atau sama dengan Rp. 21.000.000 akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan habis (3 bulan).
  4. Biaya-biaya pelaksanaan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL I  
BIAYA PELAKSANAAN PROYEK TAHUN 1999

BULAN	BIAYA BAHAN	TENAGA KERJA	BIAYA OPERASI	PRESTASI KERJA
JANUARI				
FEBRUARI				
MARET				
APRIL				
MEI				
JUNI				
JULI	120.300.000	12.000.000	3.650.000	
AGUSTUS	83.300.200	13.500.000	5.200.000	20%
SEPTEMBER	66.350.400	10.000.000	4.500.300	45%
OKTOBER	53.000.700	9.750.000	2.500.250	70%
NOVEMBER	42.700.800	16.300.000	4.000.750	100%
DESEMBER				

Sumber: Data Intern Perusahaan

Dari laporan administrasi proyek untuk proyek pembangunan bengkel praktek berdasarkan perhitungan pihak perusahaan diperoleh perhitungan laba rugi sebagai berikut:

#### LAPORAN RUGI-LABA PROYEK

Nama proyek : Bengkel Praktek  
 Lokasi : Gresik  
 Mulai pengerjaan : 22 Juli 1999  
 Selesai pengerjaan : 28 November 1999  
 Nilai kontrak : Rp. 525.000.000

---

Penerimaan pengerjaan	Rp. 525.000.000
Biaya pokok pengerjaan	<u>Rp. 427.202.300</u>
Laba kotor	Rp. 97.797.700
Biaya operasi	<u>Rp. 19.850.200</u>
Laba sebelum bunga	Rp. 77.947.500
Bunga	<u>Rp. -</u>
Laba sebelum pajak	Rp. 77.947.500
Pajak (PPH dan PPN)	<u>Rp. 57.272.800</u>
Laba bersih	Rp. 20.674.700

---

Sumber: Data Intern Perusahaan

Pada nilai kontrak sebesar **Rp. 525.000.000** tersebut termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai sebesar  $(10/110 * 525.000.000)$  Rp. 47.727.300 sesuai

dengan yang tertera dalam paket kontrak. Pajak Pertambahan Nilai tersebut seharusnya dikeluarkan dari pendapatan karena bukan merupakan bagian dari penghasilan atau imbalan yang diterima atau yang akan diterima dari suatu pendapatan kontrak.

Biaya pokok pengejaan merupakan biaya yang langsung berhubungan dengan proyek, yang terdiri dari:

- biaya bahan material untuk proyek tersebut sebesar Rp. **365.651.300**
- biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp. **61.551.000**

Pada biaya bahan tersebut terdiri dari barang kena pajak dan bukan barang kena pajak yang dipergunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut mulai bulan Juli sampai bulan November **1999**.

Biaya operasi sebesar Rp. **19.850.200** merupakan jumlah seluruh biaya operasi selama pengejaan proyek pembangunan bengkel praktek tersebut.

Pajak sebesar Rp. **57.272.800** merupakan gabungan dari Pajak Penghasilan sebesar Rp. **9.545.500** (2% \* **477.273.000**) dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. **47.727.300** (10% \* Rp.477.273.000). Di mana PPH tersebut merupakan pajak final dan PPN tersebut merupakan PPN Keluaran bagi perusahaan.

### **4.3. Pembahasan**

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini lebih ditekankan pada masalah perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai yang tepat dan dalam penyusunan laporan laba rugi yang wajar pada perusahaan.

#### 4.3.1. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor **34** bahwa pendapatan kontrak terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak yang diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima, dan menurut UU PPN 2000 pasal 1 angka 19 : “penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”.

Dalam praktek akuntansi atas pendapatan kontrak yang dilakukan, perusahaan menyajikan pendapatan kontrak sebesar jumlah nilai yang tercantum dalam kontrak yang di dalamnya terdapat **unsur** Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini mengakibatkan pendapatan disajikan terlalu besar dan bertentangan dengan dasar perhitungan pajak menurut UU PPN 2000 karena telah memasukkan unsur PPN di dalam pendapatan. Selain itu Pajak Pertambahan Nilai bukan merupakan unsur pendapatan karena nantinya akan disetorkan ke kas negara, sehingga dalam penyajiannya harus dikeluarkan dari pendapatan, dengan *cara* mengalikan **jumlah** total pendapatan tersebut dengan 10/110. Pada contoh sebelumnya tentang proyek pembangunan bengkel praktek dengan nilai kontrak sebesar Rp. 525.000.000, maka pendapatan bersih atas proyek tersebut adalah:

Total nilai kontrak	Rp. 525.000.000
PPN (10/110 * Rp. 525.000.000)	<b>Rp. 47.727.300</b>
Pendapatan bersih	<u>Rp. 477.272.700</u>

Pendapatan tersebut diakui pada saat diterimanya uang muka pembayaran atau pada saat penerimaan pembayaran termin dari pemberi kerja. Pajak Pertambahan Nilai yang dalam hal ini merupakan PPN Keluaran bagi perusahaan akan dilaporkan ke KPP.

Mengacu pada contoh proyek pembangunan bengkel praktek seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, berikut ini penulis akan membahas tentang transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun 1999 yang berhubungan dengan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

- Bulan Juli 1999

Transaksi yang terjadi pada bulan Juli 1999 adalah pembelian bahan-bahan material, penerimaan pembayaran uang muka dari pemberi kerja dan pelaporan SPT Masa PPN bulan Juli 1999. Adapun jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

Kas/ Bank	<b>Rp. 105.000.000</b>
PPN Keluaran (10/110 * 105.000:000)	Rp. 9.545.500
Pendapatan	Rp.95.454.500

(jurnal penerimaan uang muka proyek sebesar 20% dari nilai kontrak *including* PPN).

Pada transaksi pembelian bahan material yang dilakukan oleh perusahaan, sebenarnya terdapat barang kena pajak/ BKP (misalnya paku, semen, besi, besi beton, pipa pvc, dan lain-lain) dan bukan BKP (misalnya pasir, batu, kayu dan sebagainya).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada laporan administrasi

proyek tersebut dan bukti-bukti transaksinya, penulis dapat memisahkan antara BKP dan bukan BKP pada bahan-bahan material yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dari hasil pengamatan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

Pembelian BKP	Rp. 41.971.000
Pembelian bukan BKP	: <u>Rp. 78.329.000</u>
Total pembelian Juli	: Rp. 120.300.000

Di dalam harga pembelian BKP tersebut termasuk PPN sebesar 10%, sehingga untuk mendapatkan PPN Masukan bisa diperoleh dari  $Rp. 41.971.000 * 10/110$  yaitu sebesar Rp. 3.815.500. PPN Masukan tersebut bisa dikreditkan dengan PPN Keluaran apabila perusahaan memperoleh faktur pajak standar atas pembelian barang-barang tersebut. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

Pembelian	. Rp. 116.484.500
((41.971.000-3.815.500)+78.329.000)	
PPN Masukan	Rp. 3.815.500
Kas	Rp. 120.300.000
(jurnal pembelian bahan material secara tunai)	

Sedangkan menurut perusahaan, karena perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukannya, maka jumlah total pembelian pada bulan Juli adalah sebesar Rp. 120.300.000. Dengan kata lain, perusahaan memasukkan PPN Masukannya ke dalam harga perolehan barang tersebut.

Adapun perhitungan SPT Masa PPN bulan Juli 1999 adalah sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp. 9.545.500
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp. 3.815.500</u>
Pajak yang kurang bayar bulan Juli 1999	Rp. 5.730.000

- Bulan Agustus 1999

Transaksi yang terjadi selama bulan ini adalah pembelian bahan-bahan material, penerimaan pembayaran termin I dari pemberi kerja dan pelaporan SPT Masa PPN bulan Agustus 1999. Pembelian BKP sebesar Rp. 42.187.500 *including* PPN, sehingga PPN Masukannya sebesar Rp. 3.835.300 ( $10/110 * Rp. 42.187.500$ ), dan yang bukan BKP sejumlah Rp. 41.112.700 dengan total pembelian sebesar Rp. 83.300.200. Adapun jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

Kas	Rp. 63.000.000
PPN Keluaran	Rp. 5.727.300
Pendapatan	Rp. 57.272.700
(jurnal penerimaan pendapatan termin)	
Pembelian	Rp. 79.464.900
((42.187.500-3.835.300)+41.112.700)	
PPN Masukan	Rp. 3.835.300
Kas	Rp. 83.300.200
(jurnal pembelian bahan material)	

Perhitungan SPT Masa PPN bulan Agustus adalah:

Pajak Keluaran	Rp. 5.727.300
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp. 3.835.300</u>

Pajak yang kurang bayar bulan Agustus 1999	<b>Rp. 1.892.000</b>
--	----------------------

- Bulan September 1999

Transaksi yang terjadi selama bulan ini adalah pembelian bahan-bahan material, penerimaan pembayaran termin II dan pelaporan SPT Masa PPN. Pembelian BKP sebesar Rp. 45.923.100 *including* PPN (PPN Masukannya sebesar Rp. 4.174.800) dan pembelian bukan BKP sebesar Rp. 20.427.300. Jurnal transaksi pembelian barang sama dengan jurnal pembelian bulan lalu. Demikian juga dengan penerimaan pembayaran termin kedua sebesar Rp. 105.000.000 (PPN Keluaran sebesar Rp. 9.545.500) jurnalnya sama dengan bulan lalu. Sedangkan perhitungan SPT untuk bulan September 1999 adalah:

Pajak Keluaran	Rp. 9.545.500
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp. 4.174.800</u>
Pajak yang kurang bayar bulan September 1999	Rp. 5.370.700

- Bulan Oktober 1999

Pada bulan ini transaksi yang terjadi adalah pembelian bahan-bahan material, penerimaan pembayaran termin III dan pelaporan SPT Masa PPN. Pembelian BKP sebesar Rp. 49.177.300 (PPN Masukan sebesar Rp. 4.470.700) dan pembelian bukan BKP sebesar Rp. 3.823.400. Jurnal penerimaan pendapatan termin dan jurnal pembelian barang sama dengan bulan. lalu. Sedangkan perhitungan **SPT** bulan Oktober 1999 adalah:

Pajak Keluaran	Rp. 9.545.500
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp. 4.470.700</u>
Pajak yang kurang bayar	Rp. 5.074.800

- Bulan November 1999

Pada bulan ini transaksi yang terjadi adalah pembelian BKP sebesar Rp. 42.700.000 dengan PPN Masukan sebesar Rp. 3.881.800 dan penerimaan pembayaran termin IV sebesar Rp. 126.000.000 dengan PPN Keluaran sebesar Rp. 11.454.500.

Sehingga perhitungan untuk SPT Masa bulan November 1999 adalah:

Pajak Keluaran	Rp. 11.454.500
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp. 3.881.800</u>
Pajak yang kurang bayar	Rp. 7.663.700

Dari hasil pembahasan dan perhitungan untuk proyek pembangunan bengkel praktek tersebut di atas, dengan asumsi tidak ada koreksi atas biaya operasi, maka perhitungan laba rugi untuk proyek tersebut adalah:

**CV.CMA**

Perhitungan Laba Rugi

Proyek Pembangunan Bengkel Praktek

Pendapatan	Rp. 477.272.700
Biaya langsung usaha:	
- Barang Kena Pajak	Rp. 201.780.800
- Bukan BKP	Rp. 143.692.400
- Tenaga Kerja	<u>Rp. 61.551.000</u>
	<u>Rp. 407.024.200</u>
Laba Kotor	Rp. 70.248.500

Biaya Operasi	Rp. 19.850.200
Laba Sebelum Bunga dan Pajak	Rp. 50.398.300
Bunga	Rp. 0
Laba Sebelum Pajak	Rp. 50.398.300
Pajak (PPh: 2% * 477.272.700)	Rp. 9.545.500
Laba Bersih	Rp. 40.852.800

Sumber: Data hasil olahan penulis

Dengan asumsi bahwa pajak masukannya bisa dikreditkan, maka pada harga perolehan bahan material yang merupakan Barang Kena Pajak, PPN Masukannya harus dikeluarkan dari harga perolehan karena pajak masukan yang dapat dikreditkan bukan merupakan biaya. Pendapatan harus disajikan dalam jumlah bersih/ *exclude* PPN.

Dari laporan administrasi proyek untuk proyek pembangunan rumah tinggal berdasarkan penghitungan pihak perusahaan adalah sebagai berikut:

#### LAPORAN RUGI LABA PROYEK

Nama Proyek	: Pembangunan Rumah Tinggal
Lokasi	: Surabaya
Mulai pengerjaan	: 1 November 1999
Selesai pengerjaan	: 25 Maret 2000
Nilai kontrak	: Rp. 116.000.000

---

Penerimaan pengerjaan	Rp. 116.000.000
-----------------------	-----------------

Biaya pokok pengerjaan	Rp. 75.400.000
Margin laba	Rp. 40.600.000
Biaya operasi	Rp. 3.480.000
Laba kotor	Rp. 37.120.000
Bunga	RP. 0
Laba sebelum pajak	Rp. 37.120.000
Pajak (PPH dan PPN)	Rp. 12.654.600
Laba bersih	Rp. 24.465.400

Sumber: Data Intern Perusahaan

## CV. CMA

### LAPORAN LABA RUGI

#### PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL

Pendapatan	Rp. 105.454.500
Biaya langsung usaha:	
- Barang Kena Pajak	Rp. 33.012.400
- BukanBKP	Rp. 27.830.400
- Tenaga Kerja	Rp. 11.256.000
	<u>Rp. 72.098.800</u>
Laba Kotor	<b>Rp. 33.355.700</b>
Biaya Operasi	<b>Rp. 3.480.000</b>
Laba Sebelum Bunga dan Pajak	Rp. 29.875.700

Bunga	RP. 0
Laba Sebelum Pajak	Rp. 29.875.700
Pajak (PPh: 2% * 105.454.500)	Rp. 2.109.100
Laba Bersih	Rp. 27.766.600

Sumber: Data hasil olahan penulis

Dari hasil pengamatan penulis tampak bahwa perusahaan sebenarnya bisa mendapatkan kompensasi pajak dengan cara meminta faktur pajak atas pembelian Barang Kena Pajak kepada supplier atau lebih baik mencari supplier lain (harus Pengusaha Kena Pajak) yang mau mengeluarkan faktur pajak, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Karena dengan demikian perusahaan dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak atas kelebihan pembayaran pajaknya, dan hal ini dapat lebih menguntungkan perusahaan.

#### **4.3.2. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai pada Laporan Keuangan Perusahaan**

Dari hasil pembahasan di atas, maka penyajian pada laporan laba rugi perusahaan dapat disajikan pada halaman berikut ini dengan keterangan sebagai berikut: Pendapatan usaha tersebut berasal dari 2 proyek yang dikerjakan oleh perusahaan untuk periode 1999/2000. Di mana dalam pendapatan tersebut telah disajikan sebesar pendapatan bersih tanpa ada penambahan unsur Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang diperhitungkan dari pembelian Barang Kena Pajak dan dari perolehan pendapatan yang berasal dari penyerahan Jasa Kena Pajak akan nampak pada neraca

perusahaan.

Seperti telah dijelaskan pada ruang lingkup penelitian, maka pembahasan pada penelitian ini hanya terbatas pada perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan pengaruhnya pada laporan keuangan sebagai akibat dari perlakuan akuntansi PPN tersebut.

### CV. CMA

#### Laporan Laba Rugi dan Laba Ditahan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1999-2000

	Tahun 1999	Tahun 2000
Pendapatan Usaha (exclude PPN)	Rp. 524.131.300	Rp. 582.727.200
Pendapatan Lain	Rp. 57.260.000	Rp. 60.560.000
Total Pendapatan	Rp. 581.391.300	Rp. 643.287.200
Biaya Langsung Usaha:		
Barang Kena Pajak	Rp. 207.912.400	Rp. 234.793.200
Bukan BKP	Rp. 148.261.800	Rp. 171.522.800
Tenaga Kerja Langsung	Rp. 55.017.000	Rp. 72.807.000
	Rp. 411.191.200	Rp. 479.123.000
Laba Kotor	Rp. 170.200.100	Rp. 164.164.200
Biaya Operasi Perusahaan	Rp. 25.914.300	Rp. 23.330.200
Laba Sebelum Bunga dan Pajak	Rp. 144.285.800	Rp. 140.834.000
Bunga	Rp. 0	Rp.
0		
Laba Sebelum Pajak	Rp. 144.285.800	Rp. 140.834.000
Pajak (PPh)	Rp. 10.482.700	Rp. 11.654.600

<b>Laba Bersih</b>	<b>Rp. 133.803.100</b>	<b>Rp. 129.179.400</b>
<b>Laba Ditahan Awal</b>	<b><u>Rp.82.746.800</u></b>	<b><u>Rp. 216.549.900</u></b>
<b>Laba Ditahan Akhir</b>	<b>Rp. 216.549.900</b>	<b>Rp. 345.729.300</b>

---

**Sumber: Data hasil olahan penulis**

## CV.CMA

## NERACA

Per 31 Maret 2000

(dalam ribuan rupiah)

	Tahun 1999	Tahun 2000		Tahun 1999	Tahun 2000
<b>Aktiva</b>			<b>Pasiva</b>		
<b>Aktiva Lancar</b>			<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
Kas	Rp. 63.000	Rp. 75.000	Kewajiban Pajak	Rp. 0	Rp. 0
Bank	Rp. 421.000	Rp. 503.000	Kewajiban Usaha	Rp. 26.541	Rp. 47.850
Piutang	Rp. 0	Rp. 0	PPN Keluaran	Rp. 0	
Persediaan	Rp. 62.300	Rp. 84.500			
Pekerjaan dalam proses	Rp. 0	Rp. 0			Rp. 47.850
PPN Masukan/ uang muka pajak	Rp. 20.791	Rp. 23.479			
	Rp. 567.091	Rp. 685.979	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	Rp. 0	Rp. 0
<b>Aktiva Tetap</b>			<b>Modal</b>		
Peralatan dan mesin	Rp. 96.000	Rp. 125.000	Modal sendiri	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Inventaris kantor	Rp. 20.000	Rp. 22.600	Laba Ditahan	Rp. 216.550	Rp. 345.729
Tanah	Rp. 250.000	Rp. 250.000			
Gedung	Rp. 310.000	Rp. 310.000			
<b>Total Aktiva</b>	Rp. 1.243.091	Rp. 1.393.579	<b>Total Pasiva</b>	Rp. 1.243.091	Rp. 1.393.579

Sumber:

Data

hasil

olahan

penulis